

RENJA 2021



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG**

**Jln. Mayor Abdurahman No. 200 Telp. (0261) 201 463
SUMEDANG - 45322**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dimana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2021 berpedoman terhadap Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018-2023, yang selanjutnya sebagai dasar untuk Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin;
6. Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi ;
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;
13. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia;
14. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Penyandang Cacat;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

17. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi;
18. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
19. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
20. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

- 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 28. Peraturan Menteri (PERMEN) PP&PA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
 29. Peraturan Menteri (PERMEN) PP&PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupatentahunkota Layak Anak ;
 30. Peraturan Menteri (PERMEN) PP&PA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KabupatenTahunKota Layak Anak;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembar Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);

38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2021 disusun sebagai Perencanaan tahunan yang memuat Program dan Kegiatan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Menjadi kerangka awal bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2021;
- Menjadi tolok ukur kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan dengan implementasi Program dan Kegiatan secara terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL P3A KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial P3A Tahun 2019;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumedang;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumedang;
- 2.4 Review terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumedang Tahun 2021.
- 3.3. Program dan Kegiatan Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumedang Tahun 2021.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DINAS SOSIAL P3A

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 DINAS SOSIAL P3A KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial P3A Tahun 2019;

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan SKPD dalam melaksanakan rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu SKPD yang akan diukur keberhasilan pencapaian kerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pencapaian kinerja sasaran, merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran SKPD, sekaligus dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yaitu Meningkatkan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Serta Perlindungan Perempuan dan Anak secara optimal. Tujuan tersebut selaras dengan Misi ke-1 (satu) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu *“Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat”* sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023.

Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 terhadap Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023, sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN
 URUSAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya	7.49%		1.71 FM=78.399 Realisasi 1341	2.86 (2241)	0.00	0.97 (760)		0.10 (78)	2.91 (2279)	101.64	
Pemberdayaan PMKS melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah Masyarakat Miskin yang mengikuti Pembinaan UEP	2371	Orang	371	771		760		78	1,209	156.81	a. Total Realisasi s/d tahun Berjalan = Capaian Awal (371 Orang) + Realisasi tahun Berjalan (838 Orang) b. 760 Orang UEP Unggas (Pada Dinas Peternakan dan Perikanan)

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												c. 78 Orang UEP (Dinas Sosial P3A) berupa bansos Uang yang alokasi dananya dititipkan di BPKAD
Pemberdayaan Sosial KUBE Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok yang diberdayakan melalui Program KUBE	347	Kelompok	97	147					97	65.99	a. 1 Kelompok = 10 Orang b. Total Realisasi s/d tahun Berjalan = Capaian Awal (97 Kelompok) + Realisasi tahun Berjalan (0)
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Kelompok yang dibina	14	Kelompok	10	10					10	100.00	a. 1 Kelompok = 10 Orang
												b. Total Realisasi s/d tahun Berjalan = Capaian Awal (10 Kelompok) + Realisasi tahun Berjalan (0)
Program Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang	53.24	Persen	52.14	53.24	69.91	69.91	69.91	69.91	69.91	131.31	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	menerima Jaminan Sosial											
Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Jumlah Kepala Keluarga yang Menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	5446	KK	774	1646		-	-	682	1456	88.46	Total Realisasi s/d tahun Berjalan = Capaian Awal (774 KK) + Realisasi tahun Berjalan (30 Orang)
Pendampingan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai / Rastra	Jumlah KK yang menerima Bantuan Sosial Pangan Non Tunai / Rastra	80526	KK	81528	80526	80526	80526	80526	80526	80526	100.00	80526 KK (KPM)
Pelayanan Jamkesda	Persentase Masyarakat Miskin yang mengajukan Pelayanan Jamkesda	100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100.00	Bersipat Pelayanan
Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	61323	Kpm	60055	61323	58721	58721	58721	58721	58721	95.76	58721 KPM
Peningkatan Peran Mitra Sosial dalam Keterpaduan Penanganan Bidang Sosial dan Kesehatan	Jumlah Mitra dalam penanganan Bidang Sosial dan Kesehatan	262	Orang		262		262			262	100.00	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Jumlah Dokumen Basis Data Terpadu	1	Dokumen	1	1					-	-	Anggaran Tidak terserap
Program Perlindungan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
Penanganan Masalah-masalah Strategis Menyangkut Tanggap Darurat Bencana	Persentase Korban Bencana yang ditangani	1	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Bersipat Kasus / Kejadian
Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Intensitas Penguatan Taruna Siaga bencana	1	Kali	1	1		1			1	100	
Fasilitasi Kegiatan Keserasian Sosial, Kearifan Lokal dan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Desa yang menerima Fasilitasi Keserasian Sosial, Kearifan Lokal dan Kampung Siaga Bencana	28	Desa	5	8	0	0	0	0	0	62.5	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	54.28	Persen	8.53	16.88	0	0.00	-	0.15	8.67	51.39	
	Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	51.6	Persen	2.77	11.17	0	0.00	0	1.06	3.83	34.29	
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	53.05	Persen	5.73	14.89	0	0.00	0	6.11	11.83	79.46	
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	50.34	Persen	0.68	10.61	0.00	0.00	0.33	0.55	1.56	14.67	
	Persentase PMKS yang diRehabilitasi	50	Persen	N/A	10.00	2.86	4.29	8.57	10	25.72	257.20	
Pelayanan dan Operasional Rumah Singgah	Persentase Client yang dilayani	100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100.00	Bersifat Pelayanan (70 Client)

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyuluhan Rehabilitasi Sosial Keliling	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Rehabilitasi Sosial	500	Orang		100	18	12	35	35	100	100.00	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	2215	Orang	348	698	0	0	0	6	354	8.67	Total Realisasi s/d tahun Berjalan = Capaian Awal (348 Orang) + Realisasi tahun Berjalan (6 Orang) Populasi = 4081
Rehabilitasi Tuna Susila	Jumlah Tuna Susila yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	159	Orang	50	70					50	21.10	Total Realisasi s/d tahun Berjalan = Capaian Awal (50 Orang) + Realisasi tahun Berjalan (0 Orang) Populasi = 237
Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar	Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar yang menerima bantuan sosial	145	Orang	-	25				10	10	3.46	Total Realisasi s/d tahun Berjalan = Capaian Awal (0 Orang) + Realisasi tahun Berjalan (10 Orang) Populasi = 289
Rehabilitasi Sosial Eks Warga Binaan Perumahan	Jumlah Eks Warga Binaan yang menerima bantuan Sosial	194	Orang		34					0	-	Total Realisasi s/d tahun Berjalan = Capaian Awal (0 Orang) + Realisasi tahun Berjalan (0 Orang)

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar Yang Menerima Bantuan Sosial	278	Orang	30	78				10	40	51.28	Total Realisasi s/d tahun Berjalan = Capaian Awal (30 Orang) + Realisasi tahun Berjalan (10 Orang)
Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum yang menerima bantuan sosial	34	Orang	15	18				22	37	168.18	a. Total Realisasi s/d tahun Berjalan = Capaian Awal (15 Orang) + Realisasi tahun Berjalan (22 Orang)
												b. Populasi = 52
												c. Kemungkinan penambahan kasus per Hari, minggu atau per Bulannya
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	7562	Orang	2	1514	0	0	50	84	136	0.89	Total Realisasi s/d tahun Berjalan = Capaian Awal (2 Orang) + Realisasi tahun Berjalan (161 Orang)
Penyusunan Kebijakan Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kebijakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Perda		1	0	0	0	0	0	-	Baru akan dilaksanakan padatahun 2020
Pelayanan Terpadu Fakir Miskin dan Lansia	Jumlah Sarana dan prasarana	1	Paket		1	0.25	0.25	0.25	0.25	1	100.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Besar Simpati

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang aktif	58.33	Persen	50	58.33	8.33	25.00	2.00	-	50.00	85.72	
Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang diberdayakan / dibina	6	Jenis	6	7	1	3	2	0	6	85.71	TKSK, PEKSOS, LK3, PSM, KARANG TARUNA, DAN TAGANA
Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	Persentase Pemeliharaan TMP Daerah dan Nasional	100		100	100	20.00	20.00	20.00	40.00	100.00	100.00	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah dan Nasional	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	3	Lokasi	3	3	1	1	1	0	3	100	Cimayor, Cibubuan dan Cut Nyak Dien
Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN	Jumlah Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN	2	Kali	2	2	0	0	0	2	2	100	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	100	Persen	100	100	100.00	100.00	107.00	100.00	100.00	100.00	
	Persentase Kecamatan yang telah membentuk	73.08	Persen	3.85	19.23	0	0	15.38		19.23	100.00	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	forum anak dan Sekolah Ramah Anak											
Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100.00	
Pembentukan dan Penguatan Forum Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Forum Anak	5	Forum	1	5	0		4		5	100.00	
Pengembangan Kabupaten Sumedang Menuju Kabupaten Layak Anak	Jumlah Desa / Kelurahan Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak	5	Desa/Kel/SRA	4	5			3		7	140.00	
Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Persentase OPD Responsif Gender	100	Persen	9.68	16.13	0	0	-	38.71	48.39	299.98	
	Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan	7	Perda / Perbup	1	3	0	0	2		3	100.00	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Gender yang dihasilkan											
Perumusan Kebijakan gender dan Anak	Jumlah Kebijakan Gender dan Anak	7	Perda / Perbup	1	3			2		3	100.00	Total Realisasi s/d tahun Berjalan = Capaian Awal (1 Perbup) + Realisasi tahun Berjalan (2 Perbup)
Penguatan Penyelenggaraan PUG	Jumlah Vokal Point OPD	10	Vokal Poin / OPD	6	10				24	30	300.00	
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Organisasi wanita yang aktif	100	Persen	9.52	14.29	-	-	-	-	9.52	66.62	
Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum dan Sosial	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan	50	Orang	-	50				40	40	40	
Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam	18.42	Persen	12.84	13.96	-	-	-	-	12.84	91.98	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Peningkatan Ekonomi Keluarga											
Pembinaan P2WKSS	Jumlah Perempuan yang dibina melalui Program P2WKSS	2300	Orang	1800	1900	100				1900	100	
Peningkatan Manajemen Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Jumlah Kelompok PEKKA yang dibina	17	Klmpk	12	13					12	92	
Pemberdayaan Perempuan Dalam Keluarga	Jumlah Perempuan yang dibina	600	Orang	100	200					100	50	
Peningkatan Peran Perempuan dalam membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Perempuan yang dibina	1000	Orang	500	600		100			600	100	
Pemberdayaan Perempuan dalam Organisasi	Jumlah perempuan yang dibina	500	Orang		100			100		100	100	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan yang dibina melalui Program P2WKSS	100	Orang		100			100		100	100	
Integrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Perempuan yang dibina melalui	500	Orang		100			0		0	-	

Tabel 2.2
EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN
URUSAN WAJIB SKPD (ADUM)
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persen		100	25.00	25.00	25.00	25.00	100	100	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	3	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	100	
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	13	Jenis	13	13	13	13	13	13	13	100	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	10	Jenis	10	10	10	10	10	10	10	100	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Koordinasi	128	Kali	128	128	30	29	42	27	128	100	
Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	3	Jenis	3	3		1	2		3	100	
Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan Kantor	5	Orang	5	5	5	5	5	5	5	100	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	4	Orang	4	4	4	4	4	4	4	100	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Persen		100	20.00	25.00	35.00	20.00	100.00	100	
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Peralatan Kantor	3	Jenis	3	3	0	2	1	0	3	100	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	6	Unit	1	2	0	0	1	0	2	100	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	30	Unit	30	30	30	30	30	30	30	100	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor / Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor / Gedung Kantor yang dipelihara	8	Jenis	8	8		1	6	1	8	100	
Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Halaman Kantor yang ditata	3	Jenis	-	1		1			1	100	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	Persen		100%			-	-			
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan	27	Orang	-	1						-	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	Persen		100%			-	-			
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	110	Stel	-	55						-	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja	100%	Persen		100.00	14.29	28.57	14.29	42.86	100	100	
	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah	100%	Persen		100.00	25	25	25	25	100	100	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	8	Dokumen	7	7	1	2	1	3	7	100	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	12	3	3	3	3	12	100	
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	100%	Persen		100.00	14.29	42.86	-	42.86	100.00	100	
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	8	Dokumen	8	7	1	3	0	3	7	100	
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi	Persentase Ketersediaan Data Kepegawaian	100%	Persen		100.00	-	33.33	33.33	33.33	100.00	100	

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA 2018-2023	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA TAHUN 2019	REALISASI KINERJA TAHUN 2019				TOTAL REALISASI s.d Tahun 2019	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	Keterangan
						TRIWULAN						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kepegawaian SKPD												
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola	3	Dokumen	3	3		1	1	1	3	100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Analisis yang dilakukan adanya faktor yang berfungsi sebagai determinan atau penentu keberhasilan, faktor yang dimaksud adalah kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dan pihak lain dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program serta perkembangannya kerjasama lintas sektor, dalam rangka memudahkan setiap pihak yang terkait untuk menilai target capaian kinerja pelayanan SKPD. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang kewajiban daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. Kabupaten Layak Anak;
4. Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkat Ekonomi Keluarganya;
5. Nilai Sakip Perangkat Daerah;
6. Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah;
7. Jumlah Inovasi SKPD;
8. Indeks Pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi.

Adapun ukuran keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diukur dengan *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah Kabupaten / Kota*, yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang disabilitas Terlantar diluar panti Sosial;
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar panti Sosial;
4. Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial;
5. Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah kabupaten / Kota.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumedang 2018-2023
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA						REALISASI KINERJA					PERSENTASE CAPAIAN KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR PERIODE	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	10,05	9,25	8,45	7,65	6,85	6,05	6,05	9,15	-	-	-	-	112,50	-	-	-	-
Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Kabupaten Layak Anak	Skor	501	601	650	701	750	807	807	549,7	-	-	-	-	91,46	-	-	-	-
Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkat Ekonomi Keluarganya	Persen	0,70	1,70	2,70	3,70	4,70	5,70	5,70	0	-	-	-	-	41,18	-	-	-	-

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA						REALISASI KINERJA					PERSENTASE CAPAIAN KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023	AKHIR PERIODE	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skor	B	B	BB	A	A	AA	AA	B	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	Persen	94,53	95	95	95	95	95	95	94,28	-	-	-	-	99,24	-	-	-	-
Jumlah Inovasi SKPD	Inovasi	N/A	1	2	3	4	5	5	2	-	-	-	-	200	-	-	-	-
Indeks Pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi	Persen	56,05	65	70	75	80	85	85	23,5	-	-	-	-	36,15	-	-	-	-

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumedang 2018-2023
Berdasarkan Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial
Tahun 2019

INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET					REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang disabilitas Terlantar diluar panti Sosial	Persen	100	100	100	100	100	51,39	-	-	-	-
Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	Persen	100	100	100	100	100	79,46	-	-	-	-
Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar panti Sosial	Persen	100	100	100	100	100	14,67	-	-	-	-
Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persen	100	100	100	100	100	34,29	-	-	-	-
Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah kabupaten / Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Anak Kabupaten Sumedang. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumedang yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumedang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, pembinaan dan Pemberdayaan Sosial ;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial dan bidang Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial dan Pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek, yakni :

- 1) Permasalahan dalam Aspek Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- 2) Permasalahan dalam Aspek Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 3) Permasalahan dalam Aspek Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial;
- 4) Permasalahan dalam Aspek Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ada beberapa faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendorong dalam pelayanan yang dapat mempengaruhi lancarnya penyelenggaraan program dan kegiatan dalam pelayanan Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga dapat menghambat dalam pencapaian realisasi kinerja SKPD, diantaranya adalah :

1. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Adapun permasalahan yang dapat menghambat dimaksud, yaitu :

- a) Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum akurat (valid);
- b) Peran Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum Maksimal;

- c) Belum terintegrasinya pelayanan kesejahteraan sosial tingkat desa;
 - d) Sarana dan prasarana pelayanan sosial belum memadai.
2. Masih Rendahnya Tingkat Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- Permasalahan ini dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan maupun pembangunan di Kabupaten Sumedang yang belum responsif gender dan anak.
3. Masih Rendahnya Tingkat Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
- Adapun permasalahan yang dapat menghambat dimaksud, yaitu :
- a) Koordinasi antar instansi/lembaga dan pihak terkait lainnya belum optimal;
 - b) Sarana dan Prasarana pendukung belum memadai;
 - c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak kekerasan.

2.4. Review Renja SKPD terhadap Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran SKPD tahun 2020

Dokumen Rencana Kerja tahun 2020 memuat informasi tentang Rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya setelah menimbang alokasi dana (PI SKPD), sehingga ditentukan Program dan kegiatan mana yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada table 2.5

Tabel 2.5

**Review Terhadap Renja terhadap Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran 2020
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sumedang**

No	Renja 2020						Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran SKPD 2020				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Pagu	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran
A	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya	Persen	4,01	2.300.000.000,00	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya	4,01	450.671.750,00
1	Pemberdayaan PMKS melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Kab. Sumedang	Jumlah Masyarakat Miskin yang mengikuti Pembinaan UEP	Orang	1171	750.000.000,00	Pemberdayaan PMKS melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Kab. Sumedang	Jumlah Masyarakat Miskin yang mengikuti Pembinaan UEP	1171	338.623.750,00
2	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Kab. Sumedang	Jumlah Kelompok yang dibina	Kelompok	11	50.000.000,00	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Kab. Sumedang	Jumlah Kelompok yang dibina	11	112.048.000,00

No	Renja 2020						Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran SKPD 2020				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Pagu	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran
3	Pemberdayaan Sosial KUBE Keluarga Miskin	Kab. Sumedang	Jumlah Kelompok yang diberdayakan melalui Program KUBE	Kelompok	197	1.500.000.000,00					
B.	Program Jaminan Sosial		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial	Persen	53,24	4.600.000.000,00	Program Jaminan Sosial		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial	53,24	2.162.455.200,00
	Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Kab. Sumedang	Jumlah Kepala Keluarga yang Menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	KK	2546	1.000.000.000,00	Pendampingan Program Keluarga Harapan	Kab. Sumedang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	61323	358.820.000,00
	Pendampingan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai / Rastra	Kab. Sumedang	Jumlah KK yang menerima Bantuan Sosial Pangan Non Tunai / Rastra	KK	80526	350.000.000,00	Pendampingan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai / Rastra	Kab. Sumedang	Jumlah KK yang menerima Bantuan Sosial Pangan Non Tunai / Rastra	80526	89.719.000,00
	Pendampingan Program Keluarga Harapan	Kab. Sumedang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	Kpm	61323	1.000.000.000,00	Jaminan Sosial bagi Korban Bencana Setelah Tanggap Darurat Bencana	Kab. Sumedang	Persentase Korban Bencana yang Menerima Jaminan	100	116.208.000,00

No	Renja 2020						Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran SKPD 2020				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Pagu	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran
	Pelayanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan yang Terintegrasi Sistem JKN	Orang	17035	250.000.000,00	Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Basis Data Terpadu	1	1.465.905.000,00
	Jaminan Sosial bagi Korban Bencana Setelah Tanggap Darurat Bencana	Kab. Sumedang	Persentase Korban Bencana yang Menerima Jaminan	Persen	100	500.000.000,00	Pelayanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Daerah	Kab. Sumedang	Jumlah Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan yang Terintegrasi Sistem JKN	17035	131.803.200,00
	Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Basis Data Terpadu	Dokumen	1	1.500.000.000,00					
C.	Program Perlindungan Sosial		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	550.000.000,00	Program Perlindungan Sosial		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	225.900.000,00

No	Renja 2020						Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran SKPD 2020				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Pagu	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran
	Penanganan Masalah - Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Darurat Bencana Alam dan Bencana Sosial	Kab. Sumedang	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persen	100	250.000.000,00	Penanganan Masalah - Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Darurat Bencana Alam dan Bencana Sosial	Kab. Sumedang	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial	100	225.900.000,00
	Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanganan Kebencanaan	Kab. Sumedang	Intensitas Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanganan Kebencanaan	Kali	2	200.000.000,00	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Kegiatan Kereserasian Sosial, Kearifan Lokal dan Kampung Siaga Bencana	Kab. Sumedang	Jumlah Desa yang menerima Fasilitasi Kereserasian Sosial, Kearifan Lokal dan Kampung Siaga Bencana	Desa	13	100.000.000,00	-	-	-	-	-

D.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	Persen	26,17	2.205.000.000,0 0	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	26,17	2.203.470.900,0 0
			Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	20,74				Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	20,74	
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	24,05				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	24,05	
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	20,54				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	20,54	
			Persentase PMKS yang diRehabilitasi	Persen	20,00				Persentase PMKS yang diRehabilitasi	20,00	

Pelayanan dan Operasional Rumah Singgah	Kab. Sumedang	Persentase Client yang dilayani	Persen	100	75.000.000,00	Pelayanan dan Operasional Rumah Singgah	Kab. Sumedang	Persentase Client yang dilayani	100	42.869.950,00
Penanganan PMKS Jalanan	Kab. Sumedang	Persentase PMKS Jalanan yang Ditangani	Persen	100	100.000.000,00	Penanganan PMKS Jalanan	Kab. Sumedang	Persentase PMKS Jalanan yang Ditangani	100	74.841.400,00
Penyuluhan Rehabilitasi Sosial Keliling	Kab. Sumedang	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Rehabilitasi Sosial	Orang	200	100.000.000,00	Penyuluhan Rehabilitasi Sosial Keliling	Kab. Sumedang	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Rehabilitasi Sosial	200	57.785.400,00
Pelayanan Terpadu Fakir Miskin dan Lansia	Kab. Sumedang	Jumlah Sarana dan prasarana	Paket	1	500.000.000,00	Pelayanan Terpadu Fakir Miskin dan Lansia	Kab. Sumedang	Jumlah Sarana dan prasarana	1	500.000.000,00
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	Kab. Sumedang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	Orang	1068	500.000.000,00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	Kab. Sumedang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	1068	107.318.900,00
Bimbingan Keluarga Penyandang	Kab. Sumedang	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas	Orang	20	50.000.000,00					

	Disabilitas Terlantar di Luar Panti		Terlantar di Luar Panti yang Menerima bimbingan sosial								
	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Luar Panti	Kab. Sumedang	Jumlah Anak Terlantar Yang Menerima Bantuan Sosial	Orang	126	60.000.000,00	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Luar Panti	Kab. Sumedang	Jumlah Anak Terlantar Yang Menerima Bantuan Sosial	126	44.330.250,00
	Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	Kab. Sumedang	Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum yang menerima bantuan sosial	Orang	22	30.000.000,00	Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	Kab. Sumedang	Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum yang menerima bantuan sosial	22	24.330.250,00
	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	Kab. Sumedang	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	Orang	3026	500.000.000,00	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	Kab. Sumedang	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	3026	321.739.000,00
				Perda			Penyusunan Kebijakan Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Kab. Sumedang	Jumlah Kebijakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	300.000.000,00
	Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Tidak Potensial	Kab. Sumedang	Jumlah Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima Jaminan	Orang	261	100.000.000,00	Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Tidak Potensial	Kab. Sumedang	Jumlah Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima Jaminan	261	24.230.000,00

	Rehabilitasi Tuna Susila	Kab. Sumedang	Jumlah Tuna Susila yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	Orang	90	50.000.000,00	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar	Kab. Sumedang	Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar yang menerima bantuan sosial	Orang	50	50.000.000,00	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sosial Pengidap HIV / AIDS (ODHA)	Kab. Sumedang	Jumlah Pengidap HIV / AIDS (ODHA) yang menerima Bantuan Sosial	Orang	11	30.000.000,00	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sosial Eks Warga Binaan Perumahan	Kab. Sumedang	Jumlah Eks Warga Binaan yang menerima bantuan Sosial	Orang	74	60.000.000,00	-	-	-	-	-
				Paket			Pelayanan Terpadu Fakir Miskin dan lansia (DAK Fisik Reguler)	Kab. Sumedang	Jumlah sarana dan Prasarana	1	59.256.000,00
				Orang			Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti (DAK Fisik Reguler)	Kab. Sumedang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang menerima bantuan kebutuhan dasar	11	28.820.000,00

				Orang			Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Luar Panti (DAK Fisik Reguler)	Kab. Sumedang	Jumlah Anak Terlantar yang menerima bantuan kebutuhan dasar	204	546.590.000,00
				Orang			Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar diluar Panti (DAK Fisik Reguler)	Kab. Sumedang	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima bantuan kebutuhan dasar	43	70.740.000,00
E.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang aktif	Persen	58,33	550.000.000,00	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang aktif	58,33	833.376.500,00
	Penyusunan Kebijakan tentang PSKS	Kab. Sumedang	Jumlah Kebijakan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	Perbup	4	50.000.000,00	-	-	-	-	-
	Penguatan Peranan Karang Taruna di Bidang Kesejahteraan Sosial	Kab. Sumedang	Jumlah Pengurus Karang Taruna yang dibina	Orang	50	50.000.000,00	Penguatan Peranan Karang Taruna di Bidang Kesejahteraan Sosial	Kab. Sumedang	Jumlah Pengurus Karang Taruna yang dibina	50	86.809.000,00
	Penguatan Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Kab. Sumedang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial	Orang	26	150.000.000,00	Penguatan Peranan Tenaga Kesejahteraan	Kab. Sumedang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina	26	52.900.000,00

	Kecamatan (TKSK)		Kecamatan yang dibina				Sosial Kecamatan (TKSK)				
	Asistensi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), LK3 dan Peksos	Kab. Sumedang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Lembaga	3	50.000.000,00	Asistensi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), LK3 dan Peksos	Kab. Sumedang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	3	33.230.000,00
	Penguatan Peranan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Kab. Sumedang	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	Orang	70	50.000.000,00	Penguatan Peranan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Kab. Sumedang	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	70	33.900.000,00
	Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)	Kab. Sumedang	Jumlah Puskesmas yang dibentuk di setiap desa	Puskesmas	70	200.000.000,00	Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)	Kab. Sumedang	Jumlah Puskesmas yang dibentuk di setiap desa	70	626.537.500,00
F.	Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan		Persentase Pemeliharaan TMP Daerah dan Nasional	Persen	100	125.000.000,00	Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan		Persentase Pemeliharaan TMP Daerah dan Nasional	100	232.095.250,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah dan Nasional	Kab. Sumedang	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Lokasi	3	100.000.000,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah dan Nasional	Kab. Sumedang	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	3	88.360.000,00

	Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN	Kab. Sumedang	Jumlah Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN	Kali	2	25.000.000,00	Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN	Kab. Sumedang	Jumlah Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN	2	143.735.250,00
G.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	Persen	100	535.000.000,00	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	100	349.173.900,00
			Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak	Persen	30,77				Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak	30,77	
	Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Sumedang	Persentase Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	150.000.000,00	Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Sumedang	Persentase Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	100	107.506.200,00
	Advokasi Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan peningkatan Kualitas Hidup dan Anak	Kab. Sumedang	Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup dan Anak	Orang	50	50.000.000,00	-	-	-	-	-
	Pencegahan Kekerasan termasuk TPPO Terhadap	Kab. Sumedang	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan	Orang	50	50.000.000,00	Pencegahan Kekerasan termasuk TPPO Terhadap	Kab. Sumedang	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan	50	59.431.700,00

Perempuan dan Anak		terhadap Perempuan dan Anak				Perempuan dan Anak		terhadap Perempuan dan Anak		
Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak	Kab. Sumedang	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak	Orang	100	50.000.000,00	-	-	-	-	-
Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Pendidikan dan Budaya	Kab. Sumedang	Jumlah Sekolah Ramah Anak	SRA	7	50.000.000,00	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Pendidikan dan Budaya	Kab. Sumedang	Jumlah Sekolah Ramah Anak	7	32.766.000,00
Penguatan Kelembagaan Anak	Kab. Sumedang	Jumlah Forum/Lembaga yang dibentuk	Forum	4	50.000.000,00	Penguatan Kelembagaan Anak	Kab. Sumedang	Jumlah Forum/Lembaga yang dibentuk	4	61.377.750,00
Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kab. Sumedang	Intensitas Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kali	2	135.000.000,00	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kab. Sumedang	Intensitas Pengembangan Kabupaten Layak Anak	2	88.092.250,00

No	Renja 2020						Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran SKPD 2020				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Pagu	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran
H.	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak		Persentase OPD Responsif Gender	Persen	33,87	595.000.000,00	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak		Persentase OPD Responsif Gender	33,87	109.242.100,00
			Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender yang dihasilkan	Perda / Perbup	4				Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender yang dihasilkan	4	
	Perumusan Kebijakan gender dan Anak	Kab. Sumedang	Jumlah Kebijakan Gender dan Anak	Perda / Perbup	4	200.000.000,00					
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Kab. Sumedang	Intensitas Penguatan Kelembagaan PUG	Kali	4	100.000.000,00	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Kab. Sumedang	Intensitas Penguatan Kelembagaan PUG	4	40.255.800,00
	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	Kab. Sumedang	Intensitas Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE	Kali	1	50.000.000,00					

No	Renja 2020						Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran SKPD 2020				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Pagu	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran
	Pelatihan Perencana dan Penganggaran Responsif gender	Kab. Sumedang	Jumlah OPD yang dibina dalam Perencana dan Penganggaran Responsif gender	OPD	11	75.000.000,00					
	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	Dokumen	3	70.000.000,00	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Kab. Sumedang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	3	68.986.300,00
	Pengarusutamaan Gender	Kab. Sumedang	Jumlah Penghargaan APE	APE	2	100.000.000,00					
I.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan		Persentase Organisasi Wanita yang aktif	Persen	33,33	127.543.800,00	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan		Persentase Organisasi Wanita yang aktif	33,33	180.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kesetaraan gender	Kab. Sumedang	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kesetaraan Gender	Orang	50	50.000.000,00					
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab. Sumedang	Jumlah Organisasi yang dibina	Organisasi	8	40.000.000,00	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab. Sumedang	Jumlah Organisasi yang dibina	8	180.000.000,00

No	Renja 2020						Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran SKPD 2020				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Pagu	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran
	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Sumedang	Jumlah Organisasi yang dibina	Organisasi	4	37.543.800,00					
	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Perempuan yang mendapatkan pemberdayaan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga	Persen	15,07	420.000.000,00	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Perempuan yang mendapatkan pemberdayaan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga	15,07	692.703.850,00
	Pembinaan P2WKSS	Kab. Sumedang	Jumlah Perempuan yang dibina melalui Program P2WKSS	Orang	2000	100.000.000,00	Pembinaan P2WKSS	Kab. Sumedang	Jumlah Perempuan yang dibina melalui Program P2WKSS	2000	112.885.200,00
	Peningkatan Manajemen Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Kab. Sumedang	Jumlah Kelompok PEKKA yang dibina	Klmpk	14	40.000.000,00					
	Peningkatan Ketahanan Keluarga	Kab. Sumedang	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang dibina	Kelompok	3	40.000.000,00	Peningkatan Ketahanan Keluarga	Kab. Sumedang	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang dibina	3	34.500.000,00
	Penyuluhan Bagi Ibu-ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Kab. Sumedang	Jumlah Peserta Penyuluhan	Orang	150	40.000.000,00					

No	Renja 2020						Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran SKPD 2020				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Pagu	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Anggaran
	Pemberdayaan Perempuan Dalam Keluarga	Kab. Sumedang	Jumlah Perempuan yang dibina	Orang	300	100.000.000,00	Pemberdayaan Perempuan Dalam Keluarga	Kab. Sumedang	Jumlah Perempuan yang dibina	300	155.249.650,00
	Peningkatan Peran Perempuan dalam membangun Keluarga Sejahtera	Kab. Sumedang	Jumlah Perempuan yang dibina	Orang	700	50.000.000,00	Peningkatan Peran Perempuan dalam membangun Keluarga Sejahtera	Kab. Sumedang	Jumlah Perempuan yang dibina	700	167.059.000,00
	Pemberdayaan Perempuan dalam Organisasi	Kab. Sumedang	Jumlah perempuan yang dibina	Orang	200	50.000.000,00	Pemberdayaan Perempuan dalam Organisasi	Kab. Sumedang	Jumlah perempuan yang dibina	200	223.010.000,00
	Integrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Sumedang	Jumlah Perempuan yang dibina melalui	Orang	200	300.000.000,00	-	-	-	-	-
JUMLAH						12.007.543.800					6.107.969.600

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020

Proses pengajuan usulan kegiatan masyarakat pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dilakukan melalui proses partisipatif. Usulan diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan maupun langsung dari Pokok-pokok Pikiran anggota Legislatif sebagai penampung aspirasi dari masyarakat kepada SKPD. Ada beberapa usulan dari kecamatan yang diusulkan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, berdasarkan rekapitulasi dari Musrenbang Kecamatan.

Tabel 2.6
Usulan Kegiatan tahun 2020 Masyarakat Hasil dari Musrenbang Kecamatan tahun 2019

NO	KECAMATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6
1	GANEAS	Pembentukan Puskesmas	8 Desa	8 Puskesmas	75.000.000
2	PAMULIHAN	Peningkatan kapasitas Karang Taruna Kecamatan	Pamulihan	1 Kali	80.000.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan nasional untuk mencapai kedaulatan pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim serta kelautan dalam lima tahun ke depan. Pemerintah juga berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, dengan mendorong warga Indonesia memiliki jiwa gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antar kelompok sosial.

Pemerintah juga ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan

keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertumbuhan berkualitas itu dicapai secara bersamaan dengan meraih keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, dan mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Dalam satu tahun pertama, yakni pada 2015, agenda pembangunan bertujuan membangun fondasi untuk akselerasi pembangunan yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Hal itu disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak," seperti tertulis dalam Perpres tersebut. Untuk agenda pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan," kata Perpres itu. RPJMN 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (Nawa Cita) Presiden, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional. Selain itu, menurut Perpres tersebut, RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sementara Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang secara substantif bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (a-spatial). Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan:

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian sosial tahun 2015-2019.
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Adapun arah kebijakan nasional maupun provinsi Jawa Barat mengenai Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional/Provinsi Jawa Barat

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A.	Kebijakan Nasional		
	Urusan Sosial		
1	Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek kehidupan	RPJMN 2015-2019 (Buku II)	Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial
2	Penguatan skema perlindungan sosial bagi lansia,	RPJMN 2015-2019 (Buku II)	Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial
	Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak		
1	meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	RPJMN 2015-2019 (Buku II)	Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2	meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO	RPJMN 2015-2019 (Buku II)	Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3	meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	RPJMN 2015-2019 (Buku II)	Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	pemerataan dan ketersediaan layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus	RPJMN 2015-2019 (Buku II)	Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak
	layanan PAUD-HI bagi seluruh anak	RPJMN 2015-2019 (Buku II)	Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak
	percepatan kepemilikan akta kelahiran	RPJMN 2015-2019 (Buku II)	Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak
	kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak	RPJMN 2015-2019 (Buku II)	Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak
	informasi layak anak melalui pengawasan materi dan akses	RPJMN 2015-2019 (Buku II)	Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak
	peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak	RPJMN 2015-2019 (Buku II)	Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak
	jumlah dan kualitas tenaga penyedia layanan	RPJMN 2015-2019 (Buku II)	Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak
	advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah, pemerintah daerah masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan lingkungan ramah anak	RPJMN 2015-2019 (Buku II)	Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak
	upaya perwujudan kota/kabupaten layak anak termasuk di dalamnya perwujudan sekolah ramah anak	RPJMN 2015-2019 (Buku II)	Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak

B.	Kebijakan Provinsi		
	Urusan Sosial		
1	mencegah timbulnya Masalah Kesejahteraan Sosial dan Memberikan Pelayanan Sosial dan memberikan pelayanan social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), melalui sistem panti dan luar panti atau berbasis masyarakat/ komunitas, serta bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya	RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018	Startegi dan Arah Kebijakan Misi ke-5 (Bidang Sosial)
2	meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS, dengan arah kebijakan pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial.	RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2019	Startegi dan Arah Kebijakan Misi ke-5 (Bidang Sosial)
	Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak		
1	meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan dengan arah kebijakan peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan	RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2020	Startegi dan Arah Kebijakan Misi ke-5 (Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak)
2	mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dengan arah kebijakan pemberdayaan gender/pemberdayaan perempuan	RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2021	Startegi dan Arah Kebijakan Misi ke-5 (Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak)
3	mencegah dan menangani perdagangan perempuan dan anak (trafficking) dengan arah kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking)	RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2022	Startegi dan Arah Kebijakan Misi ke-5 (Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak)
4	mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) dan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri dengan arah kebijakan (1) terwujudnya kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai kota layak anak; (2) pengokohan ketahanan keluarga,(3) Pengendalian dan menata kependudukan	RENCANA KERJA DINAS SOSIAL P3A TAHUN 2021 RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2023	57 Startegi dan Arah Kebijakan Misi ke-5 (Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak)

Adapun keterkaitan Renstra Dinsos P3A dengan Dokumen Perencanaan lainnya disajikan pada

tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Keterkaitan Renstra Dinsos P3A dengan Dokumen Perencanaan lainnya

KEMENTERIAN SOSIAL		DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG	
URUSAN SOSIAL					
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif	1 Penataan Asistensi Sosial melalui Program Keluarga Produktif dan sejahtera	1 Mempercepat penanganan permasalahan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Program prioritas Bebas PMKS Jalanan	1 Mengoptimalkan kemitraan dengan PSKS dan memanfaatkan sarana / prasarana pelayanan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial.	1 Menyelenggarakan pelayanan terhadap PMKS secara merata untuk semua wilayah;	1 Peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
	2 Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan pekerja informal miskin dan rentan	2 Revitalisasi, Optimalisasi dan Fasilitasi Balai/Panti Sosial yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Mengoptimalkan kemampuan profesionalitas SDM Dinas Sosial untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.	2 Meningkatkan penanganan korban bencana alam dan sosial selama dan setelah tanggap darurat;	2 Peningkatan penanganan bagi Korban Bencana;
	3 Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek kehidupan	3 Meningkatkan efektifitas, kapasitas dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	3 Meningkatkan kerjasama dengan Akademi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan dan Komunitas dalam rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial.	3 Meningkatkan peran mitra sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Sosial (PMKS);	3 Penguatan kapasitas dan kualitas mitra sosial;
	4 Penguatan kelembagaan sosial yang meliputi standar pelayanan, sistem rujukan, data dan sistem pengaduan yang terintegrasi serta asistensi sosial	4 Meningkatkan Kemitraan dengan berbagai stakeholder seperti Dinas / Instansi terkait, Perguruan Tinggi, PSKS termasuk dunia usaha dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial.	4 Mengoptimalkan implementasi Undang-Undang, perda dan peraturan lainnya serta tupoksi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan	4 Meningkatkan pemeliharaan nilai-nilai kepelawanan dan kesetiakawanan sosial;.	4 Peningkatan Nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;

KEMENTERIAN SOSIAL		DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG	
			kesejahteraan sosial.		
2 Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan	1 Peningkatan peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengembangan ekonomi lokal bagi masyarakat miskin dan rentan	5 Meningkatkan Sinergitas dan Jejaring Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan multi Stake Holder serta Mitra Kerja.	5 Mengoptimalkan kerjasama dan sinergitas dengan Kab/Kota dalam implementasi dan pengalokasian anggaran APBD Kabupaten/Kota	5 Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	5 Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah.
	2 Peningkatan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan rentan		6 Memanfaatkan kerjasama / kemitraan dengan berbagai lembaga untuk melakukan pendataan PMKS secara akurat.		
3 Perluasan dan Peningkatan Akses Pelayanan Dasar	1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan		7 Mengoptimalkan network / jaringan komunikasi dan informasi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta Masyarakat Penyelenggara dan Pemerhati Masalah Kesejahteraan Sosial.		
	2 Meningkatkan Penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan		8 Memfasilitasi Balai/Panti Sosial untuk menangani PMKS di Provinsi maupun Kabupaten/Kota		
	3 Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi Verifikasi, validasi, dan sistem pengelolaan data PMKS sebagai basis data terpadu				
4 Penguatan Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1 Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS)				
	2 Peningkatan kualitas SDM penyelenggara kesejahteraan Sosial				
	3 Peningkatan penerapan standar pelayanan pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial				
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		DINAS P3AKB PROVINSI JAWA BARAT		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG	
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1 meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	1 Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai	1 Terwujudnya pengarusutamaan gender (PUG) dengan melibatkan kerjasama pemerintah,	1 Memantapkan Kinerja Pokja PUG /Focal Point di OPD-OPD	1 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;	1 Peningkatan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak;

KEMENTERIAN SOSIAL		DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG	
	tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;	masyarakat dan dunia usaha			
	2 Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah;	2 Meningkatkan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan serta perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	2 Memantapkan Penerapan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Berbasis Gender (ARG)	2 Meningkatkan peran perempuan serta di bidang politik, sosial dan ekonomi;	2 Penguatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
	3 Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG		3 Penerapan sistem informasi/ data terpilah		3 Peningkatan pemberdayaan perempuan
	4 Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.		4 Penyebarluasan informasi, pemahaman dan penerapan PUG.		
2 meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO	1 Penyediaan data dan informasi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) secara lengkap dan kontinyu		5 Fasilitasi Penyediaan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan perempuan		
	2 Peningkatan advokasi dan sosialisasi KtP kepada pemangku kepentingan terkait serta memperkuat mekanisme koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP		6 Fasilitasi Peningkatan pelayanan lembaga ekonomi dan lapangan kerja bagi perempuan		
	3 Penegakan hukum, melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku KtP untuk memberikan efek jera		7 Fasilitasi Peningkatan pendidikan dan wawasan politik bagi perempuan		
	4 Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial)		8 Sosialisasi dan implementasi Undang undang perlindungan perempuan dan anak sesuai hak-hak perempuan dan anak		
	5 Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP		9 Sosialisasi prosedur penanganan kasus KDRT dan Peningkatan fasilitasi bagi lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai jenis kekerasan		
	6 Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam		10 Peningkatan sosialisasi hak dan kewajiban pendidik, orangtua		

KEMENTERIAN SOSIAL		DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG	
	pencegahan dan penanganan KtP		dan anak beserta dampak negatif		
3	meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	1	Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang PUG/PPRG, termasuk data terpilah	11	Pengembangan kegiatan kreatif bagi anak
		2	Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;	12	Optimalisasi kerjasama dan pengembangan jejaring kerjasama
		3	Peningkatan sosialisasi dan pelatihan tentang pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan/pemerintah daerah;	13	Meningkatkan fasilitasi pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi perempuan
		4	Pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan;	14	Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha
		5	Identifikasi dan revisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP yang disharmonis;	15	Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan domestik dan kekerasan pada lingkungan komunitas lainnya, serta perdagangan perempuan dan anak
		6	Penyusunan aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO	16	Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik dan jabatan politik
		7	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP kepada semua pemangku kepentingan;	17	Mengembangkan pelayanan lembaga pelayanan pengaduan korban kekerasan
		8	Penguatan mekanisme koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP;	18	Meningkatkan sosialisasi dan dukungan dukungan advokasi dan fasilitasi bagi Komisi Perlindungan Anak (KPA) khusus bagi

KEMENTERIAN SOSIAL		DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG	
			daerah dan LSM pemerhati anak		
	9 Peningkatan efektivitas pelatihan SDM di kementerian/ lembaga/SKPD/unit layanan terkait KtP		19 Meningkatkan sosialisasi perundang-undangan tentang perlindungan terhadap anak dan sanksi pelanggarnya		
	10 Pengembangan insentif untuk SDM di kementerian/lembaga/SKPD/ unit layanan terkait KtP		20 Mendorong penyelenggaraan kegiatan kreatif untuk anak		
	11 Pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data KtP		21 Mengembangkan koordinasi dan mendorong tersedianya akses kerjasama dan pengembangan jejaring		
4 meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	1 Peningkatan pemerataan ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif/khusus untuk anak rentan		22 Meningkatkan akses dan informasi bagi anak		
	2 Peningkatan layanan PAUD-HI bagi seluruh anak				
	3 Percepatan kepemilikan akta kelahiran				
	4 Peningkatan dan penguatan kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak;				
	5 Pengawasan materi dan akses untuk menyediakan informasi layak anak				
	6 Peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak				
	7 Advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan pemenuhan hak anak				
	8 Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak, termasuk di dalamnya sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, partisipasi anak serta lingkungan dan ruang bermain ramah anak				
5 penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak	1 Peningkatan upaya pencegahan, termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak;				

KEMENTERIAN SOSIAL		DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG	
kekerasan, eksploitasi penelantaran, dan perlakuan salah lainnya					
	2 Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;				
	3 Peningkatan upaya untuk mencegah perkawinan di usia anak				
	4 Peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga pengganti dan pengasuhan alternatif				
	5 Perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan;				
	6 Penyusunan strategi dan materi KIE yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat;				
	7 Advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media masa;				
	8 Pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak; dan				
	9 Peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengasuhan alternatif.				
6 peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak	1 penguatan dan harmonisasi perundangundangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya;				
	2 peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi				

KEMENTERIAN SOSIAL		DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMEDANG	
	secara berkelanjutan;				
	3 penguatan sistem manajemen dan pemanfaatan data dan informasi lintas kementerian/lembaga/SK PD				
	4 peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah pusat dan daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif anak				

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja tahun 2021 Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumedang

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjawab tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang merumuskan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sumedang terpilih untuk Periode 2019-2023 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023. Adapun Visi dari Kepala Daerah terpilih yaitu ***“Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023”***.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kepala Daerah terpilih menetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;

4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.

Untuk Mendukung Visi Kepala Daerah Kabupaten Sumedang terpilih periode tahun 2019-2023 sesuai tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang mempunyai keterkaitan dengan Misi ke -1 (satu) Kepala Daerah terpilih yaitu *“Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat”*.

Adapun program dan kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dicanangkan untuk mendukung Misi ke- 1 (satu) Pemerintah Daerah tersebut adalah :

A. URUSAN SOSIAL

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Program Jaminan Sosial;
3. Program Perlindungan Sosial;
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
6. Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan.

B. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak;
3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan;
4. Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga.

3.2.1. Tujuan

Dalam mempercepat tercapainya Misi ke-1 (satu) Kepala Daerah terpilih periode tahun 2019-2023, Maka tujuan pembangunan dari pada Dinas Sosial ,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

- a) Meningkatkan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta Perlindungan Perempuan dan Anak secara Optimal;
- b) Meningkatkan kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance).

3.2.2. Sasaran

Untuk mendukung tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang , maka sasaran untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b) Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
- c) Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- d) Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah.

BAB IV

RANCANGAN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang tahun 2021 merupakan Penjabaran dari Renstra 2018-2023 yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyelenggarakan pembangunan mengenai Urusan Sosial serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta target dan pendanaannya sebagaimana tertera pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan
Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEBUTUHAN PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Serta Perlindungan Perempuan dan Anak secara optimal	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya	Persen	5,18	580.000.000
			Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Kelompok yang dibina	Kelompok	12	80.000.000
			Pemberdayaan Sosial KUBE Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok yang diberdayakan melalui Program KUBE	Kelompok	247	500.000.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEBUTUHAN PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
			Program Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima Jaminan Sosial	Persen	53,24	3.250.000.000
			Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Jumlah Kepala Keluarga yang Menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	KK	3446	1.000.000.000
			Pendampingan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai / Rastra	Jumlah KK yang menerima Bantuan Sosial Pangan Non Tunai / Rastra	KK	80.526	350.000.000
			Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	Kpm	61.323	1.000.000.000
			Pelayanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Daerah	Jumlah Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan yang	Orang	25.235	250.000.000

				Terintegrasi Sistem JKN			
			Jaminan Sosial bagi Korban Bencana Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Jaminan	Persen	100	400.000.000
			Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Jumlah Dokumen Basis Data Terpadu	Dokumen	1	250.000.000
			Program Perlindungan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	650.000.000
			Penanganan Masalah - Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Darurat Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persen	100	250.000.000
			Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanganan Kebencanaan	Intensitas Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanganan Kebencanaan	Kali	3	300.000.000

			Fasilitasi Kegiatan Keserasian Sosial, Kearifan Lokal dan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Desa yang menerima Fasilitasi Keserasian Sosial, Kearifan Lokal dan Kampung Siaga Bencana	a Des	18	100.000.000
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	Persen	35,14	2.480.000.000
				2 Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	29,79	
				3 Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	Persen	33,21	

				4 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	30,47	
				5 Persentase PMKS yang diRehabilitasi	Persen	30	
			Pelayanan Operasional dan Rumah Singgah	Persentase Client yang dilayani	Persen	100	75.000.000
			Penanganan PMKS Jalanan	Persentase PMKS Jalanan yang Ditangani	Persen	100	125.000.000
			Penyuluhan Rehabilitasi Sosial Keliling	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Rehabilitasi Sosial	Orang	300	100.000.000
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	Orang	1443	530.000.000

			Bimbingan Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang Menerima bimbingan sosial	Orang	40	50.000.000
			Rehabilitasi Tuna Susila	Jumlah Tuna Susila yang menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	Orang	110	50.000.000
			Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar	Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar yang menerima bantuan sosial	Orang	75	50.000.000
			Rehabilitasi Sosial Eks Warga Binaan Perumahan	Jumlah Eks Warga Binaan yang menerima bantuan Sosial	Orang	114	60.000.000
			Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar Yang Menerima Bantuan Sosial	Orang	174	60.000.000

			Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum yang menerima bantuan sosial	Orang	26	30.000.000
			Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar	Orang	4538	500.000.000
			Pelayanan Terpadu Fakir Miskin dan Lansia	Jumlah Sarana dan prasarana	Paket	1	750.000.000
			Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Tidak Potensial	Jumlah Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima Jaminan	Orang	261	100.000.000
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang aktif	Persen	58,33	2.650.000.000

			Penguatan Peranan Karang Taruna di Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pengurus Karang Taruna yang dibina	Orang	100	150.000.000
			Penguatan Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina	Orang	26	100.000.000
			Penguatan Peranan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), LK3 dan Peksos	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Lembaga	3	50.000.000
			Penguatan Peranan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	Orang	140	150.000.000
			Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)	Jumlah Puskesmas yang dibentuk di setiap desa	Puskesmas	140	2.200.000.000
			Program Kelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	Persentase Pemeliharaan TMP Daerah dan Nasional	Persen	100	175.000.000
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah dan Nasional	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Lokasi	3	150.000.000
			Peringatan Hari Pahlawan dan HKSAN	Jumlah Peringatan Hari Pahlawan dan HKSAN	Kali	2	25.000.000

	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	Persen	100	615.864.100
		Kabupaten Layak Anak		2 Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak	Persen	42.31	
			Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	90.000.000
			Advokasi Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan peningkatan Kualitas Hidup dan Anak	Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup dan Anak	Orang	100	50.000.000
				Pencegahan Kekerasan termasuk TPPO Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Orang	100
			Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak	Orang	150	50.000.000

			Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Pendidikan dan Budaya	Jumlah Sekolah Ramah Anak	SRA	10	50.000.000
			Penguatan Kelembagaan Anak	Jumlah Forum/Lembaga yang dibentuk	Forum	7	90.864.100
			Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Intensitas Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kali	3	235.000.000
	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang meningkat Ekonomi Keluarganya	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Persentase OPD Responsif Gender	Persen	61.29	620.000.000
Jumlah Kebijakan Pengarusutamaan Gender yang dihasilkan				Perda / Perbup	5		
Perumusan Kebijakan gender dan Anak			Jumlah Kebijakan Gender dan Anak	Perda / Perbup	5	200.000.0000	
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender			Intensitas Penguatan Kelembagaan PUG	Kali	8	100.000.000	
Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender			Intensitas Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE	Kali	2	50.000.000	

			Pelatihan Perencana dan Penganggaran Responsif gender	Jumlah OPD yang dibina dalam Perencana dan Penganggaran Responsif gender dan Anak	OPD	28	150.000.000
			Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	Dokumen	3	120.000.000
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Organisasi wanita yang aktif	Persen	54.76	300.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kesetaraan gender	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kesetaraan Gender	Orang	100	100.000.000
			Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi yang dibina	Organisasi	12	100.000.000
			Pembinaan Organisasi Masyarakat	Jumlah Organisasi yang dibina	Organisasi	9	100.000.000
			Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perempuan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga	Persen	16.19	824.879.411

			Pembinaan P2WKSS	Jumlah Perempuan yang dibina melalui Program P2WKSS	Orang	2100	100.000.000
			Peningkatan Manajemen Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Jumlah Kelompok PEKKA yang dibina	Klmpk	15	150.000.000
			Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang dibina	Kelompok	4	50.000.000
			Penyuluhan Bagi Ibu-ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Peserta Penyuluhan	Orang	210	74.879.411
			Pemberdayaan Perempuan Dalam Keluarga	Jumlah Perempuan yang dibina	Orang	400	50.000.000
			Peningkatan Peran Perempuan dalam membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Perempuan yang dibina	Orang	800	50.000.000
			Pemberdayaan Perempuan dalam Organisasi	Jumlah perempuan yang dibina	Orang	300	50.000.000
			Integrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Perempuan yang dibina	Orang	300	300.000.000
TOTAL							12.145.743.511

Tabel. 4.2
Program dan Kegiatan yang dibiayai dari Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK)
Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran 2021

NO.	PROG / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU (Rp)	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Sejenisnya	Persen	5,18			
1.	Pemberdayaan PMKS melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah Masyarakat Miskin yang mengikuti Pembinaan UEP	Orang	1571			
	<i>Pemberdayaan PMKS melalui Usaha Ekonomi Produktif</i>		<i>Orang</i>	<i>50</i>	<i>126.500.000</i>	<i>Desa Linggajaya Kec. Cisitu</i>	<i>Tidak Diakomodir</i>
2.	Pemberdayaan Sosial KUBE Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok yang diberdayakan melalui Program KUBE	Kelompok	247			
	<i>Pemberdayaan PMKS melalui KUBE</i>		<i>Kelompok</i>	<i>10</i>	<i>115.750.000</i>	<i>10 Desa Kec. Paseh</i>	<i>Tidak Diakomodir</i>

	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditangani	Persen	100			
		Persentase Kecamatan yang telah membentuk Forum Anak dan Sekolah Ramah Anak	Persen	42,31			
4.	Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100			
	<i>Pembentukan dan Pembinaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)</i>		<i>Paket</i>	<i>1</i>	<i>57.500.000</i>	<i>Kec. Conggeang</i>	<i>Disetujui</i>
5.	Pemberdayaan Perempuan dalam Keluarga	Jumlah Perempuan yang dibina	Orang	400			
	<i>Pelatihan Sekolah Perempuan Menggapai Cita-cita</i>		<i>Paket</i>	<i>1</i>	<i>65.000.000</i>	<i>Kec. Sumedang Utara</i>	<i>Disetujui</i>
	<i>Pemberdayaan Perempuan Dalam Keluarga</i>		<i>Paket</i>	<i>1</i>	<i>50.000.000</i>	<i>Kec. Cibugel</i>	<i>Disetujui</i>
	<i>Pembinaan Ketahanan Keluarga</i>		<i>Paket</i>	<i>1</i>	<i>115.750.000</i>	<i>Kec. Tanjungmedar</i>	<i>Tidak Diakomodir / Pindah ke DPPKB</i>
JUMLAH PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN					172.500.000		

BAB V PENUTUP

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang selaku penanggung jawab dan pelaksana teknis penyelenggaraan pembangunan Urusan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyusun Dokumen Rencana Kerja untuk tahun 2021 dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan pada Urusan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang tahun 2021, pada intinya memuat Program / Kegiatan pada Rencana Strategis 2018-2023.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2021 ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan Forum SKPD pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang tahun 2020. Pada akhirnya Kami menyadari, bahwa Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sumedang Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Sumedang, 2020
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMEDANG
Kepala,


AGUS MUSLIM, S.Pd
Pembina Muda / IVc
NIP. 19670727 199702 1 004